

TESIS

**PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS YANG
BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN**

Oleh :

**SASTRI HASNUR PRATIWI
152012323**



Pembimbing:

- 1. Dr. AZMI FENDRI, SH., M.Kn**
- 2. Dr. BEATRIX BENNI, SH., M.Pd., M.Kn**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2019

PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

Tesis, S2, Sastri Hasnur Pratiwi, 1520123023
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pada saat berlakunya UUJN No. 30 Tahun 2004, muncul suatu perdebatan terkait dengan adanya kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini di picu karena adanya pejabat lain dalam hal ini PPAT yang juga mempunyai kewenangan dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam proses pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997, bahwa yang membantu Kepala Kantor Pertanahan adalah PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang telah diberikan kepada notaris dalam UUJN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian yang menekankan pada aspek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan *yuridis empiris*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dari akta yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan notaris adalah bersifat luas, artinya notaris bisa membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan merupakan kewenangan PPAT. SKMHT adalah satu-satunya akta PPAT yang pembuatannya juga dimiliki oleh Notaris.

Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Akta Pertanahan

NOTARY IN MAKING AUTHORITY OF DOCUMENTS RELATING TO LAND

*Thesis, S2, By Sastri Hasnur Pratiwi, 1520123023
Notary Master Program, Faculty of Law, University of Andalas*

ABSTRACT

The notary public officials are authorized to make an authentic deed, besides other prescribed by statute the authority. At the time of the enactment UUJN No. 30 Tahun 2004, a debate emerged related to the authority notaries in making the deed associated with land. It is in the trigger because of other dignitaries in this PPAT who also has the authority in making the deed associated with land. In the process of land registration as mentioned in PP No. 24 Tahun 1997, that which, aids the head of the land office is PPAT. This study aims to find out about to look at what the meaning of the deed which as pertaining to land that has been granted to a notary in UUJN.

The main approach method used in this research is the normative juridical approach that is research that emphasizes the legal aspects, by studying the materials of primary law and secondary law which will be used as guidance in understanding and analyzing the problems discussed, while as supporting the main approach Empirical juridical approach is used.

Research suggests that the significance of related to land certificate which is the authority of the notary is wide it could make a notarial deed with regard to land as long as it does not constitute the PPAT.

Keywords : *Authority, Notary, Land Deed*

